

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut tersebar baik di daratan maupun di lautannya. Salah satu sumber daya alam yaitu pada sektor pertambangan timah. Penambangan timah telah banyak menghasilkan devisa negara namun juga dapat merusak lingkungan jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menyuarakan aspirasi daerah serta mewakili kepentingan daerah-daerah di tingkat nasional. Pengawasan Undang-undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pertambangan timah melibatkan beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini mengkaji mengenai Revitalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Terhadap Pertambangan Timah di Lingkungan Parit Pekir Kecamatan Sungailiat Provinsi Bangka Belitung. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif hasil olah data Observasi atau Secara langsung menggunakan sumber data Primer Wawancara melalui dokumentasi serta data skunder yaitu, Buku, Jurnal dan Lain sebagainya. Konsep teoritis yang digunakan peneliti adalah Pertambangan Timah, Lembaga DPD, dan Teori Representasi Daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara Revitalisasi pengawasan DPD RI terhadap pertambangan timah di Parit Pekir, Bangka Belitung, bertujuan untuk meningkatkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan langsung. Masyarakat berharap DPD RI lebih aktif dalam pengawasan dengan regulasi ketat dan transparansi. Namun, revitalisasi ini menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada kerjasama, resistensi pihak terkait, dan kurangnya transparansi. Identifikasi faktor-faktor ini diharapkan dapat mendorong langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat pengawasan dan menjaga keberlanjutan serta keadilan dalam industri pertambangan.

**Kata Kunci: Revitalisasi, Pertambangan Timah, dan Pengawasan DPD RI**

## **Abstract**

Indonesia is a country rich in natural resources. This wealth is spread both on land and in the sea. One of the natural resources is the tin mining sector. Tin mining has generated a lot of foreign exchange for the country but can also damage the environment if it is not planned and managed well. The Regional Representative Council (DPD) has a role in making laws, overseeing government, and voicing regional aspirations and representing regional interests at the national level. The Regional Representative Council's (DPD) statutory supervision of tin mining involves several aspects regulated in the 1945 Constitution.

This research examines the Revitalization of the Supervisory Function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) regarding Tin Mining in the Parit Pekir Environment, Sungailiat District, Bangka Belitung Province. This type of research is Descriptive Qualitative as a result of observational data processing or directly using primary data sources, interviews through documentation and secondary data, namely books, journals and so on. The theoretical concepts used by researchers are Tin Mining, DPD Institutions, and Regional Representation Theory.

This research shows that based on the results of interviews, the revitalization of DPD RI supervision of tin mining in Parit Pekir, Bangka Belitung, aims to improve the function of legislation, budgeting and direct supervision. The public hopes that DPD RI will be more active in monitoring with strict regulations and transparency. However, this revitalization faces obstacles such as limited resources, dependence on cooperation, resistance from related parties, and lack of transparency. Identification of these factors is expected to encourage corrective measures to strengthen supervision and maintain sustainability and fairness in the mining industry.

**Keywords: Revitalization, Tin Mining, and Supervision of DPD RI**